

# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)**



*Sekretariat DPRD Provinsi  
Sulawesi Tengah*

*Printech : E Program*

**Tahun 2023**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Ranja Tahun Sebelumnya dan Pencapaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	16
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja	24
2.5 Penelaahan Usulan Program	34
BAB III Tujuan dan Sasaran	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	35
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV Rencana Kerja Tahun 2023	48
BAB V Penutup	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Dan Pencapaian Rentra Tahun 2022	8
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Set. DPRD 2022	17
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2022	22
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	34
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	37
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Wabah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdampak terhadap perekonomian seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan meninggalnya jutaan manusia. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah hancurnya dunia usaha dengan tutupnya gerai-gerai usaha nasional seperti Matahari, *Giant* dan sebagainya. Dampak yang terlihat dari pemerintahan adalah meninggalnya pegawai, tutupnya kantor yang menerapkan Work From Home. Hal ini menyebabkan cukup banyak pekerjaan yang terlambat dikarenakan kurangnya pemahaman Aparatur Sipil Negara terhadap penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas.

Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 melakukan langkah-langkah kongkrit terutama dalam rancangan dan pelaksanaan anggaran terutama penanganan covid-19. Salah satu langkah kongkritnya yaitu menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan terdapat dua komponen yang perlu diperhatikan yaitu analisis gambaran umum pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu.

Penganggaran ini disebut juga sebagai anggaran berbasis kinerja. Kebijakan ini perlu didukung oleh sistem yang dapat menyediakan data informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. APBD berbasis kinerja yang disusun, didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang telah ditetapkan. Untuk dapat membuat APBD berbasis kinerja, OPD harus memiliki perencanaan strategis (RENSTRA).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Renstra disusun secara objektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah(OPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang meliputi Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi wadah tunggal dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. SIPD menjadi sistem monitoring dan evaluasi berjenjang dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Hal ini diharapkan agar pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Pusat seiring dengan Rencana Pembangunan Daerah sehingga akan terwujud Keadilan Sosial sesuai dengan harapan Pancasila.

Sistem monitoring dan evaluasi yang diberlakukan oleh SIPD akan menciptakan keselarasan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 Tahunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan

Perangkat Daerah (RENJA) sehingga target yang dibebankan dalam RPJMD dan sudah dianggarkan dalam APBD akan tercapai. Perangkat Daerah tetap perlu melakukan evaluasi Target Kinerja Tahunannya sehingga Indeks Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tetap memiliki Predikat Baik.

## **1.2. Landasan Hukum**

- 1). Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU No. 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
- 2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 4). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
- 6). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
- 7). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
  - 8). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
  - 9). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  - 10). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
  - 11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
  - 12). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah.
  - 13). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

- 14). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
- 15). Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (lembaran daerah provinsi sulawesi tengah tahun 2016 nomor 88, tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi tengah nomor 74);
- 16). Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 17). Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126).
- 18). Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 19). Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2018-2021;
- 20). Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah;
- 21). Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 22). Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- 23). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Nomor 5, Tahun 2008);



### **1.3.Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- 1). Pedoman dan landasan bagi komponen-komponen (unit-unit) dalam Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyusun program/kegiatan tahunan.
- 2). Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- 3). Sebagai acuan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja setiap OPD.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan renja tahunan ini meliputi: Bab 1 Pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

Bab 2 Evaluasi pelaksanaan renja Tahun lalu meliputi ; evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun 2021 dan capaian Renstra, Analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi , reviu terhadap rencangan awal rencana kerja pemerintah daerah dan penelaahan usulan program.

Bab 3 tujuan, sasaran, program dan kegiatan meliputi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja OPD dan program dan kegiatan; terakhir Bab 4 penutup.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2023.**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra**

Perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemutakhiran Kode Rekening Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah mengubah beberapa pokok Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang awalnya memiliki 7 Program dan 19 Kegiatan bergeser menjadi 2 Program, 18 Kegiatan dan 114 Sub Kegiatan yang disusun sesuai indikator dan pencapaian yang ditargetkan. Evaluasi terhadap Rencana Kerja n-1 dan n-2 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2023 Perubahan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %			2022	2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/4		
							7/6			11 = 5+7+10			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b>	66.5	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	63.05	68.64	109%	64.5		68.64	103%		
	<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>NILAI SAKIP</b>	80	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	76	75.24	99%	78		75.24	94%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	2	2	100%	2	2	4	67%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	2	2	100%	2	2	4	67%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	67%		
	<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Realisasi Anggaran</b>	90%	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	90	91.62	102%	90%		90%	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	120	96	80%	120	100	95	79%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	1	33%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %			2022	2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b> <b>7/6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b> <b>11 = 5+7+10</b>	<b>12=11/4</b>		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	2	2	100%	2	2	2	33%		
	<b>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	1	33%		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	1	33%		
	<b>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian</b>	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	1	33%		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	7	7	100%	9	9	16	533%		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6750	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	45	45	100%	6750	6750	6750	100%		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	45	45	100%	80	80	125	156%		
	<b>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	67%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	5	5	100%	5	5	10	333%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	4	4	100%	4	4	8	267%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %			2022	2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 7/6	9	10	11 11 = 5+7+10	12=11/4		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	2	2	3	100%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	4	4	100%	5	5	9	300%		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	TRANSISI PERMENDGRI	4	4	100%	12	12	16	44%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	100	100	100%	12	12	112	311%		
	<b>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	67%		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	7	7	100%	10	10	17	567%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	127	127	100%	187	187	314	10467%		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	4	4	100%	5	5	9	300%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	9	9	100%	129	129	138	4600%		
	<b>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	67%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	4	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	4	4	100%	1	1	5	125%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %			2021	2022	2022	2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 7/6	9	10	11 11 = 5+7+10	12=11/4			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	0	0	-	1	1	1	100%			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	12	12	100%	12	12	24	200%			
	<b>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	4	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	50%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	13	13	100%	22	22	35	233%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	356	356	100%	538	538	894	894%			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	4	4	100%	4	4	4	50%			
	<b>9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Jumlah Laporan Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	36	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	12	12	100%	12	12	24	67%			
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	45	45	100%	45	45	45	100%			
	<b>10. Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD</b>	4	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	4	4	100%	1	1	5	125%			
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi/Target Renstra (%)
					2022	2022	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/4
							7/6			11	
										11 = 5+7+10	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	12	12	100%	12	12	24	200%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	4	4	100%	4	4	8	200%
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>PRESENTASE PERATURAN DAERAH YANG DITETAPKAN</b>	80%	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	80	100	125%	80%	100%	250%	313%
		<b>REKOMENDASI DPRD TERHADAP EKSEKUTIF</b>	30	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	30	72	240%	30 Kep	39 Kep	111	370%
	<b>11. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang di Bahas</b>	9	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	9	9	100%	10	10	19	211%
		<b>Jumlah Dokumen Peraturan DPRD yang dibahas</b>	0	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	0	0	0%	0	1	1	#DIV/0!
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1 Dok	1	2	200%
	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	20	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	9	9	100%	10	10	19	95%
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	4	4	100%	4	6	8	67%
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	4	4	100%	4	6	6	150%
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	1	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %			2022	2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2021	2021	2021					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12=11/4</b>	
							<b>7/6</b>			<b>11 = 5+7+10</b>		
	<b>12. Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Jumlah Dokumen Anggaran</b>	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	3	3	100%	3	3	6	200%	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%	
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%	
	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%	
	<b>13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	5	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	5	5	100%	5	5	10	200%	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Infrastruktur	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Perekonomian	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Sumber Daya Alam	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %			2022	2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 7/6	9	10	11 11 = 5+7+10	12=11/4		
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%		
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%		
	<b>14. Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Jumlah Laporan Peningkatan SDM DPRD</b>	4	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	50%		
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	2	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	2	2	3	150%		
	Pendalaman Tugas DPRD/Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	2	2	3	300%		
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	2	2	3	150%		
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	11	11	100%	5	5	16	145%		
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	8	8	100%	18	18	26	325%		
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%		
	<b>15. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD</b>	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	1	100%		
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	3	3	100%	3	3	6	200%		
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 7/6	9	10	11 11 = 5+7+10	12=11/4
	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	3	3	100%	3	3	6	200%
	<b>16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Tersedianya Peraturan DPRD</b>	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	1	100%
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	1	100%
	<b>17. Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pembahasan Kerjasama Daerah (MoU)</b>	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	200%
	<b>18. Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Jumlah Laporan Kinerja DPRD</b>	4	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	1	1	2	50%
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	19	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	9	9	10	53%
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4	TRANSISI PERMENDGRI 90 TAHUN 2019	1	1	100%	4	4	5	125%

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020, 2021 dan 2022 terdapat inkonsistensi Penentuan Indikator Keluaran output Perogram, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Hal ini disebabkan oleh pemutakhiran, Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Kode Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Besaran Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2023 adalah **Rp. 161.786.424.627,-** yang dibagi kedalam 2 Program yaitu **Rp. 102.682.424.387,-** Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan **Rp. 59.103.932.240,-** Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Anggaran tersebut diberikan untuk memfasilitasi 18 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

Perjanjian Kerja (PK) dibuat untuk mewujudkan Indikator Kinerja yang diberikan untuk menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah yang diemban oleh Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD terdapat 5 Indikator yang diemban yaitu Presentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Layanan, Presentase Peraturan Daerah yang ditetapkan dan Rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif.

## **2.2. Analisis Kinerja pelayanan**

Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dengan kata lain, pengukuran kinerja didahului dengan tahapan penetapan indikator kinerja dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Pengukuran kinerja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:

- (1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
- (2) Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran

yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Untuk melihat Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 2023 Perubahan

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(thn-2)	(thn-1)	(thn n)	(thn+1)	Thn n-2	Thn n-1	Thn n	Thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b>			63.05	64.5	66.5	68.5	68.84		66.5	68.5	
	<b>NILAI SAKIP</b>			76	78	80	82	75.24		80		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2	2	1	1	2	2	1	1	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan					1	1			1	1	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2	2	1	1	2	2	1	1	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan					1	1			1	1	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja					1	1			1	1	
	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>			90%	90%	90%	90%	92%				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			120	120	120	120	96	95	95	95	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2	1	1	1	2	1	1	1	
	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>			1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Lap	1 Lap			1 Lap	1 Lap	
	<b>Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian</b>			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Paket Pukisan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			7	9	1 Paket	1 Paket	7	9	1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			45	6750	6750 org	6750 org	45	6750	6750 org	6750 org	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			45	80	80 Org	80 Org	45	80	80 Org	80 Org	
	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>			1	1 Lap	4 Lap	4 Lap	1	1 Lap	4 Lap	4 Lap	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5	5	0	0	5	5	0	0	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4	4	1 Paket	1 Paket	4	4	1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1	2	1 Paket	1 Paket	1	2	1 Paket	1 Paket	

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(thn-2)	(thn-1)	(thn n)	(thn+1)	Thn n-2	Thn n-1	Thn n	Thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4	5	1 Paket	1 Paket	4	5	1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			4	12	12	12	4	12	12	12	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100	12	12	12	100	12	12	12	
	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			1	1	4 Lap	4 Lap	1	1	4 Lap	4 Lap	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			7	10	1 Unit	1 Unit	7	10	1 Unit	1 Unit	
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			127	187	1 Unit	1 Unit	127	187	1 Unit	1 Unit	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			4	5	1 Unit	1 Unit	4	5	1 Unit	1 Unit	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			9	129	1 Unit	1 Unit	9	129	1 Unit	1 Unit	
	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			1	1 Lap	4 Lap	4 Lap	1	1 Lap	4 Lap	4 Lap	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4	1 Lap	4 Lap	4 Lap	4	1 Lap	4 Lap	4 Lap	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	1 Lap	1 Lap	1 Lap	0	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			1	1 Lap	4 Lap	4 Lap	1	1 Lap	4 Lap	4 Lap	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			13	22	15 Unit	15 Unit	13	22	15 Unit	15 Unit	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			356	538	100 Unit	100 Unit	356	538	100 Unit	100 Unit	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi			4	4	4 Unit	4 Unit	4	4	4 Unit	4 Unit	
	<b>Jumlah Laporan Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>			12	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			45	45 Org	45 Org	45 Org	45	45	45 Org	45 Org	
	<b>Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD</b>			4	1 Lap	4 Lap	4 Lap	4	1 Lap	4 Lap	4 Lap	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			1	1	1 Dok	1 Dok	1	1	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			12	12	12 Lap	12 Lap	12	12	12 Lap	12 Lap	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			4	4	4 Paket	4 Paket	4	4	4 Paket	4 Paket	

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(thn-2)	(thn-1)	(thn n)	(thn+1)	Thn n-2	Thn n-1	Thn n	Thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>PRESENTASE PERATURAN DAERAH YANG DITETAPKAN</b>			80	80%	80%	80%	100%	100%	80%	80%	
	<b>REKOMENDASI DPRD TERHADAP EKSEKUTIF</b>			30 Kep	30 Kep	30 Kep	30 Kep	72 Kep	39 Kep	30 Kep	30 Kep	
	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang di Bahas			9	10	10 Perda	10 Perda	9	10	10 Perda	10 Perda	
	Jumlah Dokumen Peraturan DPRD yang dibahas			0	0	0	0	0	1 Dok	0	0	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda			9	10 Dok	10 Dok	10 Dok	9	10 Dok	10 Dok	10 Dok	
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan			4	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4	6 Dok	4 Dok	4 Dok	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			4	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4	6 Dok	4 Dok	4 Dok	
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	<b>Jumlah Dokumen Anggaran</b>			3	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3	3 Dok	3 Dok	3 Dok	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	<b>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>			5	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5	5 Lap	5 Lap	5 Lap	
	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum			1	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Infrastruktur			1	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat			1	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Perekonomian			1	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Sumber Daya Alam			1	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	<b>Jumlah Laporan Peningkatan SDM DPRD</b>			1	1 Lap	4 Lap	4 Lap	1	1 Lap	4 Lap	4 Lap	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			1	2 Dok	2 Dok	2 Dok	1	2 Dok	2 Dok	2 Dok	
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			1	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1	2 Dok	1 Dok	1 Dok	



No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(thn-2)	(thn-1)	(thn n)	(thn+1)	Thn n-2	Thn n-1	Thn n	Thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan			1	2 Dok	2 Dok	2 Dok	1	2 Dok	2 Dok	2 Dok	
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			11	5 Orang	20 Orang	20 Orang	11	5 Orang	20 Orang	20 Orang	
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			8	18 Orang	8 Orang	8 Orang	8	18 Orang	8 Orang	8 Orang	
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	<b>Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD</b>			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			3	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3	3 Lap	3 Lap	3 Lap	
	Jumlah Dokumen Pokok Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3	3 Dok	3 Dok	3 Dok	
	<b>Tersedianya Peraturan DPRD</b>			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	<b>Jumlah Dokumen Pembahasan Kerjasama Daerah (MoU)</b>			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun			1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	<b>Jumlah Laporan Kinerja DPRD</b>			1	1 Lap	4 Lap	4 Lap	1	1 Lap	4 Lap	4 Lap	
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun			1	19 Lap	19 Lap	19 Lap	1	19 Lap	19 Lap	19 Lap	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			1	4 Lap	4 Lap	4 Lap	1	4 Lap	4 Lap	4 Lap	

### **2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang maupun faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya mempengaruhi dalam memecahkan permasalahan pelayanan OPD dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut:

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026; Misi terkait dengan tugas OPD Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan tugas DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah Misi 2 RPJMD tahun 2021-2026. Secara jelas terkait Tugas dan Fungsi OPD Sekretariat Daerah adalah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tengah pada 5 (lima) tahun depan khususnya Misi 2, yaitu;

#### **Misi II : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM**

Dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran OPD;
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi DPRD;
- c. Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas Pimpinan Daerah dan DPRD.

- d. Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Guna mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dibutuhkan peran serta Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis yang di dukung dengan pemahaman terhadap faktor internal dan eksternal dalam pengambilan kebijakan. Salah satu cara dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah dengan menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman organisasi. Analisis SWOT menjadi salah satu instrumen dalam menentukan faktor-faktor tersebut. Analisis SWOT Perangkat Daerah menunjukkan beberapa hal antara lain:

## **A. Faktor Internal**

### **1. Kekuatan (S):**

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai;
- b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- a. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Pemanfaatan tenaga ahli untuk menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan DPRD.

### **2. Kelemahan (W):**

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal;
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
- d. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

## **B. Faktor Eksternal**

### **1. Peluang (O):**

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya

### **2. Ancaman/Tantangan (T):**

- a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah
- b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior
- d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

Mengacu pada alternatif strategi sebagaimana yang tercantum pada keempat kuadran di atas, maka dapat dirangkum rumusan isu-isu strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Melakukan revitalisasi dan pengembangan kelembagaan sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menuju Anggota DPRD 55 Orang dan Penyesuaian Tugas dan Fungsi sesuai nomenklatur baru;

3. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
4. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan awal Rencana Kerja**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan meliputi administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD. Evaluasi Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Perubahan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Lembar ..... dari .....

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		NILAI SAKIP	80	Rp 53,238,569,975	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		NILAI SAKIP	80	Rp 102,682,492,387	
			IKM	85				IKM	85		
			Realisasi Keuangan	90%				Realisasi Keuangan	90%		
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja	6	Rp 601,916,975	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja	6	Rp 1,140,594,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp 91,312,050	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp 160,034,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan	1	Rp 91,312,050	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan	1	Rp 151,254,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Rp 91,312,050	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Rp 60,773,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan	1	Rp 91,312,050	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan	1	Rp 57,573,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp 120,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp 180,113,600	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	Rp 116,668,775	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	Rp 530,845,200	SKM dan SKL Perangkat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>Rp 8,444,148,350</b>	<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>Rp 10,763,784,595</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Rp 7,944,148,350	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Rp 10,628,239,370	Menyesuaikan Anggaran Gaji ASN Tahun 2022
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp 250,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp 90,107,025	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Rp 250,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Rp 45,438,200	
	<b>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 50,000,000</b>	<b>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 215,102,400</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Rp 25,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Rp 24,405,400	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Rp 25,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Rp 190,697,000	Rekonsiliasi Aset Dalam Daerah
	<b>4. Administrasi Ketatausahaan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 1,369,680,750</b>	<b>4. Administrasi Ketatausahaan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 1,381,705,895</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Rp 608,747,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp 247,261,895	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6750 org	Rp 152,186,750	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6750 org	Rp 253,556,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	80 Org	Rp 608,747,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	80 Org	Rp 880,888,000	
	<b>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 3,807,269,250</b>	<b>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 5,418,006,304</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 426,122,900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 887,112,250	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 100,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 211,925,274	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 298,286,050	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 942,006,780	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Rp 1,278,368,700	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Rp 1,537,250,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp 1,704,491,600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp 1,839,712,000	
	<b>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 3,556,917,400</b>	<b>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 12,768,245,217</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp 500,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp 3,868,160,395	
	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Rp 500,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Rp 1,899,969,082	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Paket	Rp 426,122,900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Paket	Rp 1,588,264,361	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Rp 852,425,800	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Rp 3,992,860,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Rp 1,278,368,700	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Rp 1,418,991,379	
	<b>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 5,783,096,500</b>	<b>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 11,466,202,461</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Lap	Rp 1,217,494,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Lap	Rp 1,154,100,372	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	Rp 304,373,500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	Rp 72,540,089	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	Rp 4,261,229,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	Rp 10,239,562,000	
	<b>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 2,282,801,250</b>	<b>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 25,288,325,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Rp 456,560,250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Rp 922,500,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Rp 304,373,500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Rp 455,500,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Rp 1,217,494,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Rp 23,168,555,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Rp 304,373,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Rp 741,770,000	
	<b>9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Kota Palu	<b>Jumlah Laporan Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 26,176,121,000</b>	<b>9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Kota Palu	<b>Jumlah Laporan Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 31,949,748,929</b>	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Palu	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Org	Rp 25,129,076,160	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Palu	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Org	Rp 31,281,091,575	Menyesuaikan Anggaran Gaji DPRD Tahun 2022
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	Rp 523,522,420	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	Rp 588,657,354	
	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Org	Rp 523,522,420	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Org	Rp 80,000,000	
	<b>10. Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 1,166,618,500</b>	<b>10. Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 2,290,777,186</b>	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dok	Rp 10,000,000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dok	Rp 34,176,300	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Lap	Rp 60,874,000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Lap	Rp 39,499,750	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Lap	Rp 486,997,500	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Lap	Rp 1,267,548,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kota Palu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	Rp 608,747,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kota Palu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	Rp 949,553,136	
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		<b>PRESENTASE PERATURAN DAERAH YANG DITETAPKAN</b>	80%	Rp 19,689,061,890	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		<b>PRESENTASE PERATURAN DAERAH YANG DITETAPKAN</b>	80%	Rp 59,103,932,240	
			<b>REKOMENDASI DPRD TERHADAP EKSEKUTIF</b>	30 Kep				<b>REKOMENDASI DPRD TERHADAP EKSEKUTIF</b>	30 Kep		
	<b>11. Pembentukan Perda Peraturan DPRD</b>		<b>Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang di Bahas</b>	10 Perda	Rp 4,648,531,000	<b>11. Pembentukan Perda Peraturan DPRD</b>		<b>Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang di Bahas</b>	10 Perda	Rp 9,425,268,750	
			<b>Jumlah Dokumen Peraturan DPRD yang dibahas</b>	0				<b>Jumlah Dokumen Peraturan DPRD yang dibahas</b>	0		
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dok	Rp 232,426,000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dok	Rp 504,073,100	
	Pembahasan Rancangan Perda		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 Dok	Rp 3,253,972,500	Pembahasan Rancangan Perda		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 Dok	Rp 4,686,805,500	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dok	Rp 464,853,250	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dok	Rp 3,221,050,000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4 Dok	Rp 464,853,250	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4 Dok	Rp 685,988,400	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dok	Rp 232,426,000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dok	Rp 327,351,750	
	<b>12. Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Kota Palu	<b>Jumlah Dokumen Anggaran</b>	<b>3 Dok</b>	<b>Rp 334,692,390</b>	<b>12. Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Kota Palu	<b>Jumlah Dokumen Anggaran</b>	<b>3 Dok</b>	<b>Rp 712,618,750</b>	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dok	Rp 55,782,000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dok	Rp 34,999,250	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	Rp 55,782,000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	Rp 24,385,000	
	Pembahasan APBD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dok	Rp 55,782,000	Pembahasan APBD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dok	Rp 102,006,500	
	Pembahasan Perubahan APBD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dok	Rp 55,782,000	Pembahasan Perubahan APBD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dok	Rp 512,528,000	
	Pembahasan Laporan Semesteran		Jumlah Laporan Semesteran Realisasi APBD	1 Lap	Rp 55,782,390	Pembahasan Laporan Semesteran		Jumlah Laporan Semesteran Realisasi APBD		Rp 16,650,000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	Rp 55,782,000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	Rp 22,050,000	
	<b>13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>5 Lap</b>	<b>Rp 2,801,530,000</b>	<b>13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>5 Lap</b>	<b>Rp 13,074,413,500</b>	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	13 Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Lap	Rp 342,953,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	13 Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Lap	Rp 1,252,426,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	13 Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Infrastruktur	1 Lap	Rp 342,953,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	13 Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Infrastruktur	1 Lap	Rp 1,288,976,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	13 Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Lap	Rp 342,953,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	13 Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Lap	Rp 1,366,716,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	13 Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Perekonomian	1 Lap	Rp 342,953,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	13 Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Perekonomian	1 Lap	Rp 1,226,566,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	13 Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Sumber Daya Alam	1 Lap	Rp 342,953,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	13 Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Sumber Daya Alam	1 Lap	Rp 362,512,500	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dok	Rp 171,500,000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dok	Rp 26,500,000	Penyesuaian dengan Anggaran Tahun 2022



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dok	Rp 743,765,000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dok	Rp 7,528,967,000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	1 Lap	Rp 171,500,000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	1 Lap	Rp 21,750,000	
	<b>14. Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>Jumlah Laporan Peningkatan SDM DPRD</b>	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 4,844,104,000</b>	<b>14. Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>Jumlah Laporan Peningkatan SDM DPRD</b>	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 15,940,840,090</b>	
	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	2 Dok	Rp 2,789,119,500	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	2 Dok	Rp 8,149,980,000	
	Pendalaman Tugas DPRD/Bimbingan Teknis DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dok	Rp 232,426,000	Pendalaman Tugas DPRD/Bimbingan Teknis DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dok	Rp 1,656,088,000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2 Dok	Rp 929,706,500	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2 Dok	Rp 2,731,666,000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Palu	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	Rp 232,426,000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Palu	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	Rp 2,131,992,500	Penyesuaian dengan Anggaran Tahun 2022
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Palu	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	Rp 232,426,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Palu	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	Rp 820,480,000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dok	Rp 228,000,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dok	Rp 74,985,000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	Rp 200,000,000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	Rp 375,648,590	
	<b>15. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 4,650,794,000</b>	<b>15. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 13,375,530,250</b>	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Lap	Rp 325,397,000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Lap	Rp 2,055,600,000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dok	Rp 325,397,000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dok	Rp 8,110,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Reses	13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dok	Rp 4,000,000,000	Pelaksanaan Reses	13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dok	Rp 11,311,820,250	Penyesuaian dengan Anggaran Tahun 2022
	<b>16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		<b>Tersedianya Peraturan DPRD</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 50,000,000</b>	<b>16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		<b>Tersedianya Peraturan DPRD</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 471,152,050</b>	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Dok	Rp 50,000,000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Dok	Rp 471,152,050	
	<b>17. Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Pembahasan Kerjasama Daerah (MoU)</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 500,000,000</b>	<b>17. Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Pembahasan Kerjasama Daerah (MoU)</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 1,440,395,100</b>	
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dok	Rp 400,000,000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dok	Rp 1,147,230,150	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dok	Rp 100,000,000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dok	Rp 293,164,950	
	<b>18. Fasilitasi Tugas DPRD</b>		<b>Jumlah Laporan Kinerja DPRD</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 1,859,410,500</b>	<b>18. Fasilitasi Tugas DPRD</b>		<b>Jumlah Laporan Kinerja DPRD</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 4,663,713,750</b>	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dok	Rp 185,941,000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dok	Rp 415,228,000	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kota Palu	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	19 Lap	Rp 92,970,000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kota Palu	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	19 Lap	Rp 73,219,750	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dok	Rp 92,970,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dok	Rp 51,810,000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Lap	Rp 557,823,000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Lap	Rp 3,127,662,000	
	Fasilitasi Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dok	Rp 929,706,500	Fasilitasi Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dok	Rp 995,794,000	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata (riil) dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Berikut Tabel Telaahan usulan Program Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026:

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**

**Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penelaahan kebijakan nasional dapat dilihat dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 s/d 2026. Dalam pencapaian sasaran OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pencapaian target pelayanan adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur yang memahami tugas-tugas pelayanan kepada pimpinan dan anggota dewan dan dalam pelaksanaan tugas.

Adapun yang dapat menjadi pendorong dalam pelaksanaan pencapaian pelayanan adalah adanya program-program dan kegiatan serta dukungan dari pimpinan serta loyalitas staf yang mendukung pelaksanaan manajemen dan peningkatan pemahaman dan kualitas.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam kerangka rencana strategik, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah “Mewujudkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Kolaboratif.” Sasaran yang ingin dicapai adalah “Terfasilitasinya Tugas dan Fungsi DPRD.

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategi jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, maka ditetapkanlah rencana kerja tahunan. Pada tahun anggaran 2023 telah



ditetapkan rencana kerja sebagai acuan pengajuan anggaran kepada pemerintah daerah sesuai analisa kebutuhan perangkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 melakukan revisi terhadap Nomenklatur Program dan Kegiatan.

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengalami revisi dari 8 Program dan 18 Kegiatan menjadi 2 Program, 18 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan kegiatan dan penganggaran diharapkan lebih akuntabel dan secara nyata dapat menunjang pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Perubahan**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

lembar ..... dari .....

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>NILAI SAKIP</b>		<b>80</b>	<b>Rp 102,682,492,387</b>	DAU		<b>80</b>	<b>Rp 112,950,741,626</b>
		<b>IKM</b>		<b>85</b>				<b>85</b>	
		<b>Realisasi Keuangan</b>		<b>90%</b>				<b>90%</b>	
	<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja</b>	SULTENG	<b>6</b>	<b>Rp 1,140,594,400</b>	DAU		<b>6</b>	<b>Rp 1,254,653,840</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1	Rp 160,034,400	DAU		1	Rp 176,037,840
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan	Kota Palu	1	Rp 151,254,400	DAU		1	Rp 166,379,840
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Palu	1	Rp 60,773,400	DAU		1	Rp 66,850,740
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan	Kota Palu	1	Rp 57,573,400	DAU		1	Rp 63,330,740
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1	Rp 180,113,600	DAU		1	Rp 198,124,960

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

lembar ..... dari .....

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	Rp 530,845,200	DAU		1	Rp 583,929,720
	<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah</b>	SULTENG	<b>90%</b>	<b>Rp 10,763,784,595</b>	DAU		<b>90%</b>	<b>Rp 11,840,163,055</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	120	Rp 10,628,239,370	DAU		120	Rp 11,691,063,307
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1	Rp 90,107,025	DAU		1	Rp 99,117,728
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	1	Rp 45,438,200	DAU		1	Rp 49,982,020
	<b>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	SULTENG	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 215,102,400</b>	DAU		<b>1 Lap</b>	<b>Rp 236,612,640</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	1	Rp 24,405,400	DAU		1	Rp 26,845,940
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	Rp 190,697,000	DAU		1	Rp 209,766,700
	<b>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian</b>	SULTENG	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 1,381,705,895</b>	DAU		<b>1 Dok</b>	<b>Rp 1,519,876,485</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Palu	1 Paket	Rp 247,261,895	DAU		Paket	Rp 271,988,085
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		6750 org	Rp 253,556,000	DAU		45 Org	Rp 278,911,600
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		80 Org	Rp 880,888,000	DAU		45 Org	Rp 968,976,800
	<b>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	SULTENG	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 5,418,006,304</b>	DAU		<b>1 Lap</b>	<b>Rp 5,959,806,934</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	Rp 887,112,250	DAU		Paket	Rp 975,823,475
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	Rp 211,925,274	DAU		Paket	Rp 233,117,801
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	Rp 942,006,780	DAU		Paket	Rp 1,036,207,458
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palu	12	Rp 1,537,250,000	DAU		12	Rp 1,690,975,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	12	Rp 1,839,712,000	DAU		12	Rp 2,023,683,200
	<b>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	SULTENG	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 12,768,245,217</b>	DAU		<b>4 Lap</b>	<b>Rp 14,045,069,739</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	1 Unit	Rp 3,868,160,395	DAU		1 Unit	Rp 4,254,976,435
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	Rp 1,899,969,082	DAU		1 Paket	Rp 2,089,965,990
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	Rp 1,588,264,361	DAU		1 Paket	Rp 1,747,090,797
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	1 Unit	Rp 3,992,860,000	DAU		1 Unit	Rp 4,392,146,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	1 Unit	Rp 1,418,991,379	DAU		1 Unit	Rp 1,560,890,517
	<b>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SULTENG	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 11,466,202,461</b>	DAU		<b>4 Lap</b>	<b>Rp 12,612,822,707</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	4 Lap	Rp 1,154,100,372	DAU		4 Lap	Rp 1,269,510,409
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Lap	Rp 72,540,089	DAU		1 Lap	Rp 79,794,098
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Lap	Rp 10,239,562,000	DAU		12 Lap	Rp 11,263,518,200

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SULTENG	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 25,288,325,000</b>	DAU		<b>4 Lap</b>	<b>Rp 27,817,157,500</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	15 Unit	Rp 922,500,000	DAU		15 Unit	Rp 1,014,750,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	100 Unit	Rp 455,500,000	DAU		100 Unit	Rp 501,050,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	4 Unit	Rp 23,168,555,000	DAU		4 Unit	Rp 25,485,410,500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	4 Unit	Rp 741,770,000	DAU		4 Unit	Rp 815,947,000
	<b>9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Jumlah Laporan Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	SULTENG	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 31,949,748,929</b>	DAU		<b>1 Lap</b>	<b>Rp 35,144,723,822</b>
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Palu	45 Org	Rp 31,281,091,575	DAU		45 Org	Rp 34,409,200,733
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	Rp 588,657,354	DAU		1 Paket	Rp 647,523,089

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kota Palu	45 Org	Rp 80,000,000	DAU		45 Org	Rp 88,000,000
	<b>10. Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD</b>	SULTENG	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 2,290,777,186</b>	DAU		<b>4 Lap</b>	<b>Rp 2,519,854,905</b>
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Palu	1 Dok	Rp 34,176,300	DAU		1 Dok	Rp 37,593,930
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Palu	8 Lap	Rp 39,499,750	DAU		8 Lap	Rp 43,449,725
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Palu	12 Lap	Rp 1,267,548,000	DAU		12 Lap	Rp 1,394,302,800
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Kota Palu	4 Paket	Rp 949,553,136	DAU		4 Paket	Rp 1,044,508,450
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>PRESENTASE PERATURAN DAERAH YANG DITETAPKAN</b>		<b>80%</b>	<b>Rp 59,103,932,240</b>	DAU		<b>80%</b>	<b>Rp 65,014,325,464</b>
		<b>REKOMENDASI DPRD TERHADAP EKSEKUTIF</b>		<b>30 Kep</b>		DAU		<b>30 Kep</b>	
	<b>11. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang di Bahas</b>	Indonesia	<b>10 Perda</b>	<b>Rp 9,425,268,750</b>	DAU		<b>10 Perda</b>	<b>Rp 10,367,795,625</b>
		<b>Jumlah Dokumen Peraturan DPRD yang dibahas</b>		<b>0</b>		DAU		<b>0</b>	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Palu	1 Dok	Rp 504,073,100	DAU		1 Dok	Rp 554,480,410



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda		10 Dok	Rp 4,686,805,500	DAU		10 Dok	Rp 5,155,486,050
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		4 Dok	Rp 3,221,050,000	DAU		4 Dok	Rp 3,543,155,000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		4 Dok	Rp 685,988,400	DAU		4 Dok	Rp 754,587,240
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1 Dok	Rp 327,351,750	DAU		1 Dok	Rp 360,086,925
	<b>12. Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Jumlah Dokumen Anggaran</b>	SULTENG	<b>3 Dok</b>	<b>Rp 712,618,750</b>	DAU		<b>3 Dok</b>	<b>Rp 783,880,625</b>
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Palu	1 Dok	Rp 34,999,250	DAU		1 Dok	Rp 38,499,175
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Palu	1 Dok	Rp 24,385,000	DAU		1 Dok	Rp 26,823,500
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Palu	1 Dok	Rp 102,006,500	DAU		1 Dok	Rp 112,207,150
	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Kota Palu	1 Dok	Rp 512,528,000	DAU		1 Dok	Rp 563,780,800
	Pembahasan Laporan Semesteran	Jumlah Laporan Semesteran Realisasi APBD	Kota Palu	1 Lap	Rp 16,650,000	DAU		1 Lap	Rp 18,315,000
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Palu	1 Dok	Rp 22,050,000	DAU		1 Dok	Rp 24,255,000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	SULTENG	<b>5 Lap</b>	<b>Rp 13,074,413,500</b>	DAU		<b>5 Lap</b>	<b>Rp 14,381,854,850</b>
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum		1 Lap	Rp 1,252,426,000	DAU		1 Lap	Rp 1,377,668,600
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Infrastruktur		1 Lap	Rp 1,288,976,000	DAU		1 Lap	Rp 1,417,873,600
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat		1 Lap	Rp 1,366,716,000	DAU		1 Lap	Rp 1,503,387,600
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Perekonomian		1 Lap	Rp 1,226,566,000	DAU		1 Lap	Rp 1,349,222,600
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Sumber Daya Alam		1 Lap	Rp 362,512,500	DAU		1 Lap	Rp 398,763,750
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1 Dok	Rp 26,500,000	DAU		1 Dok	Rp 29,150,000
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		1 Dok	Rp 7,528,967,000	DAU		1 Dok	Rp 8,281,863,700
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah		1 Lap	Rp 21,750,000	DAU		1 Lap	Rp 23,925,000
	<b>14. Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Jumlah Laporan Peningkatan SDM DPRD</b>	Indonesia	<b>4 Lap</b>	<b>Rp 15,940,840,090</b>	DAU		<b>1 Lap</b>	<b>Rp 17,534,924,099</b>

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

lembar ..... dari .....

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		2 Dok	Rp 8,149,980,000	DAU		1 Dok	Rp 8,964,978,000
	Pendalaman Tugas DPRD/Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		1 Dok	Rp 1,656,088,000	DAU		1 Dok	Rp 1,821,696,800
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		2 Dok	Rp 2,731,666,000	DAU		1 Dok	Rp 3,004,832,600
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		20 Orang	Rp 2,131,992,500	DAU		18 Org	Rp 2,345,191,750
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		8 Orang	Rp 820,480,000	DAU		8 Org	Rp 902,528,000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		2 Dok	Rp 74,985,000	DAU		2 Dok	Rp 82,483,500
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1 Dok	Rp 375,648,590	DAU		1 Dok	Rp 413,213,449
	<b>15. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD</b>	SULTENG	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 13,375,530,250</b>	DAU		<b>1 Dok</b>	<b>Rp 14,713,083,275</b>
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		3 Lap	Rp 2,055,600,000	DAU		3 Lap	Rp 2,261,160,000
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		1 Dok	Rp 8,110,000	DAU		1 Dok	Rp 8,921,000
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 Dok	Rp 11,311,820,250	DAU		3 Dok	Rp 12,443,002,275

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Tersedianya Peraturan DPRD</b>	Indonesia	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 471,152,050</b>	DAU		<b>1 Dok</b>	<b>Rp 518,267,255</b>
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		1 Dok	Rp 471,152,050	DAU		1 Dok	Rp 518,267,255
	<b>17. Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pembahasan Kerjasama Daerah (MoU)</b>	Indonesia	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 1,440,395,100</b>	DAU		<b>1 Dok</b>	<b>Rp 1,584,434,610</b>
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		1 Dok	Rp 1,147,230,150	DAU		1 Dok	Rp 1,261,953,165
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		1 Dok	Rp 293,164,950	DAU		1 Dok	Rp 322,481,445
	<b>18. Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Jumlah Laporan Kinerja DPRD</b>	Indonesia	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 4,663,713,750</b>	DAU		<b>1 Lap</b>	<b>Rp 5,130,085,125</b>
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		4 Dok	Rp 415,228,000	DAU		4 Dok	Rp 456,750,800
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		19 Lap	Rp 73,219,750	DAU		19 Lap	Rp 80,541,725
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		3 Dok	Rp 51,810,000	DAU		3 Dok	Rp 56,991,000

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

lembar ..... dari .....

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		4 Lap	Rp 3,127,662,000	DAU		4 Lap	Rp 3,440,428,200
	Fasilitasi Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		3 Dok	Rp 995,794,000	DAU		3 Dok	Rp 1,095,373,400

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Renstra lima tahun kedepan maka rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD pada tahun 2023 adalah meliputi 2 Program, 18 kegiatan dan 76 Sub Kegiatan dengan Rincian Pendanaan yaitu Rp. **Rp. 102.682.492.387,-** untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator yang ditetapkan adalah Indeks Reformasi Birokrasi 68.5. dan Rp. **59.103.932.240,-** dengan Indikator yang ditetapkan Presentase Peraturan Daerah Yang Ditetapkan 80% dan Rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif 30 Keputusan Uraian Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)				Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting
				2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>NILAI SAKIP</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>Rp 131,246,183,917</b>	<b>78</b>	<b>Rp 94,477,505,497</b>	<b>80</b>	<b>Rp 101,548,048,387</b>		
		<b>IKM</b>	<b>76</b>	<b>76</b>		<b>80</b>		<b>85</b>			
		<b>Realisasi Keuangan</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>		<b>90%</b>		<b>90%</b>			
		<b>IKL</b>	<b>76</b>	<b>76</b>		<b>80</b>		<b>85</b>			
	<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>Rp 1,203,584,500</b>	<b>78</b>	<b>Rp 120,097,000</b>	<b>80</b>	<b>Rp 1,140,594,400</b>		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	Rp 16,520,000	2	Rp 41,582,000	1	Rp 160,034,400	Kota Palu	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan						1	Rp 151,254,400	Kota Palu	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	Rp 16,520,000	2	Rp 35,854,000	1	Rp 60,773,400	Kota Palu	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan						1	Rp 57,573,400	Kota Palu	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Rp 1,170,544,500	1	Rp 42,661,000	1	Rp 180,113,600	Kota Palu	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)				Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting
				2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1	Rp 530,845,200		
	<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>Rp 9,411,755,226</b>	<b>90%</b>	<b>Rp 9,411,755,226</b>	<b>3</b>	<b>Rp 10,763,784,595</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	120	Rp 9,321,760,476	120	Rp 9,321,760,476	98	Rp 10,628,239,370	Kota Palu	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Rp 45,213,750	1	Rp 45,213,750	1	Rp 90,107,025	Kota Palu	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Lap	2	Rp 44,781,000	1	Rp 44,781,000	1	Rp 45,438,200	Kota Palu	
	<b>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1 Lap</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 25,000,000</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 113,400,000</b>	<b>2</b>	<b>Rp 215,102,400</b>		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1	Rp 25,000,000	1	Rp 113,400,000	1	Rp 24,405,400	Kota Palu	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap					1	Rp 190,697,000		
	<b>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian</b>	<b>1 Dok</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 3,793,881,350</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 7,631,975,000</b>	<b>1</b>	<b>Rp 1,381,705,895</b>		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	Rp 827,250,000	Paket	Rp 977,250,000	4	Rp 247,261,895	Kota Palu	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)				Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting
				2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Alat	30 Alat	Rp 2,727,859,350	45 Org	Rp 5,504,475,000	45	Rp 253,556,000		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	Rp 238,772,000	45 Org	Rp 1,150,250,000	40	Rp 880,888,000		
	<b>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>1 Lap</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 8,291,244,000</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 5,078,464,851</b>		<b>Rp 5,418,006,304</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	Rp 7,823,428,075	Paket	Rp 194,508,451			Kota Palu	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	Rp 235,003,500	Paket	Rp 714,637,900	7	Rp 887,112,250	Kota Palu	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	Rp 552,487,775	Paket	Rp 180,000,000	1	Rp 211,925,274	Kota Palu	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	Rp 2,325,000,000	Paket	Rp 651,002,500	1	Rp 942,006,780	Kota Palu	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	2	Rp 1,227,490,000	12	Rp 1,887,744,000	12	Rp 1,537,250,000	Kota Palu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	Rp 2,015,850,000	12	Rp 1,450,572,000	12	Rp 1,839,712,000	Kota Palu	
	<b>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Rp 57,476,887,175</b>	<b>1</b>	<b>Rp 12,134,007,250</b>		<b>Rp 12,768,245,217</b>		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	7	Rp 2,827,100,000	Unit	Rp 1,691,036,000	11	Rp 3,868,160,395	Kota Palu	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)				Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting
				2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel						5	Rp 1,899,969,082	Kota Palu	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	75	75	Rp 720,192,800	Unit	Rp 3,160,921,250	5	Rp 1,588,264,361	Kota Palu	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75	75	Rp 50,000,000,000	Unit	Rp 3,886,000,000	75	Rp 3,992,860,000	Kota Palu	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	5	Rp 2,723,394,375	Unit	Rp 3,396,050,000	5	Rp 1,418,991,379	Kota Palu	
	<b>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Lap</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 6,362,479,816</b>	<b>Lap</b>	<b>Rp 9,708,524,506</b>	<b>1</b>	<b>Rp 11,466,202,461</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	Rp 1,034,868,184	Lap	Rp 1,042,423,800	12	Rp 1,154,100,372	Kota Palu	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	Rp -	Lap	Rp 27,762,500	1	Rp 72,540,089	Kota Palu	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	Rp 5,327,611,632	Lap	Rp 8,638,338,206	12	Rp 10,239,562,000	Kota Palu	
	<b>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Lap</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 4,764,390,000</b>	<b>Lap</b>	<b>Rp 11,618,890,000</b>	<b>4</b>	<b>Rp 25,288,325,000</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16	16	Rp 687,800,000	Unit	Rp 936,500,000	17	Rp 922,500,000	Kota Palu	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)				Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting
				2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75%	75%	Rp 763,350,000	Unit	Rp 637,270,000	30	Rp 455,500,000	Kota Palu	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75%	75%	Rp 3,312,240,000	Unit	Rp 10,045,120,000	22	Rp 23,168,555,000	Kota Palu	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1	Rp 741,770,000	Kota Palu	
	<b>9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Jumlah Laporan Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>1 Lap</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 38,401,156,850</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 36,843,663,664</b>	<b>12</b>	<b>Rp 31,949,748,929</b>		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	1 Lap	1 Lap	Rp 38,401,156,850	45 Org	Rp 36,843,663,664	45	Rp 31,281,091,575	Kota Palu	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1					3	Rp 588,657,354		
	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check-Up DPRD	45					45	Rp 80,000,000		
	<b>10. Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>1 Lap</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 1,515,805,000</b>	<b>Lap</b>	<b>Rp 1,816,728,000</b>		<b>Rp 2,290,777,186</b>		
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	75%	75%	Rp 9,175,000	Dok	Rp 28,085,000	1	Rp 34,176,300	Kota Palu	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi						8	Rp 39,499,750		
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Lap	1 Lap	Rp 452,930,000	Lap	Rp 1,072,243,000	4	Rp 1,267,548,000	Kota Palu	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	Rp 1,053,700,000	Paket	Rp 716,400,000	4	Rp 949,553,136	Kota Palu	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)				Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting
				2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>PRESENTASE PERATURAN DAERAH YANG DITETAPKAN</b>	<b>3 Draft Perda</b>	<b>3 Draft Perda</b>	<b>Rp 30,848,371,600</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 34,295,380,130</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 59,103,932,240</b>	Kota Palu	
		<b>REKOMENDASI DPRD TERHADAP EKSEKUTIF</b>	<b>50 Kep</b>	<b>50 Kep</b>		<b>30 Kep</b>		<b>30 Kep</b>			
	<b>11. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang di Bahas</b>	<b>25 Perda</b>	<b>25 Perda</b>	<b>Rp 8,965,887,250</b>	<b>12 Perda</b>	<b>Rp 5,366,685,205</b>	<b>9</b>	<b>Rp 9,425,268,750</b>	Kota Palu	
		<b>Jumlah Dokumen Peraturan DPRD yang dibahas</b>	<b>1 Dok</b>	<b>1 Dok</b>		<b>0</b>		<b>2</b>			
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dok	1 Dok	Rp 349,866,000	1 Dok	Rp 416,558,000	2 Dok	Rp 504,073,100	Kota Palu	
	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 Dok	7 Dok	Rp 2,845,470,375	9 Dok	Rp 4,464,880,075	9 Dok	Rp 4,686,805,500	Kota Palu	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dok	6 Dok	Rp 4,526,512,875	4 Dok	Rp 36,549,800	8 Dok	Rp 3,221,050,000	13 Kab/Kota	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dok	6 Dok	Rp 836,490,000	4 Dok	Rp 428,697,080	4 Dok	Rp 685,988,400	13 Kab/Kota	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dok	1 Dok	Rp 407,548,000	1 Dok	Rp 20,000,250	1 Dok	Rp 327,351,750	Kota Palu	
	<b>12. Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Jumlah Dokumen Anggaran</b>	<b>3 Dok</b>	<b>3 Dok</b>	<b>Rp 447,436,000</b>	<b>3 Dok</b>	<b>Rp 604,224,325</b>	<b>5 Dok</b>	<b>Rp 712,618,750</b>		
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dok	1 Dok	Rp 351,486,000	1 Dok	Rp 436,557,500	1 Dok	Rp 34,999,250	Kota Palu	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	1 Dok		1 Dok	Rp 23,199,825	1 Dok	Rp 24,385,000	Kota Palu	
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dok	1 Dok	Rp -	1 Dok	Rp 31,350,000	1 Dok	Rp 102,006,500	Kota Palu	
	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dok	1 Dok	Rp 34,750,000	1 Dok	Rp 91,667,000	1 Dok	Rp 512,528,000	Kota Palu	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)				Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting
				2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Laporan Semester	1 Lap					1 Dok	Rp 16,650,000	Kota Palu	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	1 Dok	Rp 61,200,000	1 Dok	Rp 21,450,000	1 Dok	Rp 22,050,000	Kota Palu	
	<b>13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 2,207,885,000</b>	<b>5 Lap</b>	<b>Rp 3,973,500,000</b>	<b>7 Lap</b>	<b>Rp 13,074,413,500</b>		
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Lap	1 Lap	Rp 205,390,000	1 Lap	Rp 296,475,000	1 Lap	Rp 1,252,426,000	13 Kab/Kota	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Infrastruktur	1 Lap	1 Lap	Rp 203,765,000	1 Lap	Rp 263,525,000	1 Lap	Rp 1,288,976,000	13 Kab/Kota	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Lap	1 Lap	Rp 198,940,000	1 Lap	Rp 337,050,000	1 Lap	Rp 1,366,716,000	13 Kab/Kota	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Perekonomian	1 Lap	1 Lap	Rp 198,890,000	1 Lap	Rp 355,925,000	1 Lap	Rp 1,226,566,000	13 Kab/Kota	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Sumber Daya Alam	1 Lap	1 Lap	Rp 99,750,000	1 Lap	Rp 430,450,000	1 Lap	Rp 362,512,500	13 Kab/Kota	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dok	1 Dok	Rp 13,750,000	1 Dok	Rp 14,850,000	1 Dok	Rp 26,500,000	13 Kab/Kota	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dok	1 Dok	Rp 1,287,400,000	1 Dok	Rp 2,275,225,000	1 Dok	Rp 7,528,967,000	13 Kab/Kota	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban APBD	1 Lap					1	Rp 21,750,000	Kota Palu	
	<b>14. Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Jumlah Laporan Peningkatan SDM DPRD</b>	<b>1 Lap</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 8,291,244,000</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 13,663,376,800</b>	<b>4</b>	<b>Rp 15,940,840,090</b>		
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	45 Orang	45 Orang	Rp 4,952,726,000	1 Dok	Rp 7,917,917,000	1	Rp 8,149,980,000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)				Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n				Lokasi	Catatan Penting
				2021		2022		2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14		
	Pendalaman Tugas DPRD/Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Keg	2 Keg	Rp 585,850,000	1 Dok	Rp 1,694,002,000	1	Rp 1,656,088,000				
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2 Keg	2 Keg	Rp 1,642,443,000	1 Dok	Rp 2,422,911,000	2	Rp 2,731,666,000				
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 SK	4 SK	Rp 306,000,000	5 Orang	Rp 256,999,800	18	Rp 2,131,992,500				
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	8 Orang	Rp 652,800,000	14 Orang	Rp 884,075,000	8	Rp 820,480,000				
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1	Rp 74,985,000				
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	1 Dok	Rp 151,425,000	1 Dok	Rp 487,472,000	1	Rp 375,648,590				
	<b>15. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD</b>	<b>1 Dok</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 7,823,428,075</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 7,684,240,250</b>	<b>1</b>	<b>Rp 13,375,530,250</b>				
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	20 Keg	20 Keg	Rp 597,650,000	3 Lap	Rp 1,175,350,000	3	Rp 2,055,600,000				
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Lap	1 Lap	Rp 589,290,000	1 Dok	Rp 122,050,000	1	Rp 8,110,000				
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Lap	3 Lap	Rp 6,636,488,075	3 Dok	Rp 6,386,840,250	3	Rp 11,311,820,250				
	<b>16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Tersedianya Peraturan DPRD</b>	<b>1 Dok</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 235,003,500</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 107,010,125</b>	<b>1</b>	<b>Rp 471,152,050</b>				
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dok	1 Dok	Rp 235,003,500	1 Dok	Rp 107,010,125	1	Rp 471,152,050				
	<b>17. Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pembahasan Kerjasama Daerah (MoU)</b>	<b>1 Dok</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 552,487,775</b>	<b>1 Dok</b>	<b>Rp 618,405,925</b>		<b>Rp 1,440,395,100</b>				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan Masa Lalu (n-2 s/d n-1)				Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan tahun n		Lokasi	Catatan Penting
				2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	10 Kep	1 Kep	Rp 552,487,775	1 Dok	Rp 318,223,575	10	Rp 1,147,230,150		
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	50 Lap	50 Lap		1 Dok	Rp 300,182,350	1	Rp 293,164,950		
	<b>18. Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Jumlah Laporan Kinerja DPRD</b>	<b>1 Lap</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 2,325,000,000</b>	<b>1 Lap</b>	<b>Rp 2,277,937,500</b>	<b>4</b>	<b>Rp 4,663,713,750</b>		
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Lap	1 Lap		1 Lap		4	Rp 415,228,000		
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	300 Surat	300 Surat	Rp 65,000,000	1 Dok	Rp 64,889,500	4	Rp 73,219,750		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Lap	1 Lap		1 Lap		3	Rp 51,810,000		
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	300 Surat	300 Surat	Rp 2,260,000,000	1 Dok	Rp 2,213,048,000	4	Rp 3,127,662,000		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Lap	1 Lap		1 Lap		3	Rp 995,794,000		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan akan mengacu kepada Petunjuk operasional yang disusun oleh Sekretariat DPRD dengan memperhatikan Rencana Kerja DPRD yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Agenda DPRD setiap Masa Persidangan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 diharapkan dapat mendorong tercapainya Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang diemban dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Sekretariat DPRD Periode 2021-2026.

Demikian Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Mei 2023

**SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,**

**SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 19700324 199503 2 006

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan akan mengacu kepada Petunjuk operasional yang disusun oleh Sekretariat DPRD dengan memperhatikan Rencana Kerja DPRD yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Agenda DPRD setiap Masa Persidangan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 diharapkan dapat mendorong tercapainya Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang diemban dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Sekretariat DPRD Periode 2021-2026.

Demikian Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Mei 2023

/ **SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,**



**SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 19700324 199503 2 006